

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 18 A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. (UUD, 1945).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Basis otonomi daerah adalah daerah kabupaten dan daerah kota yang didasarkan asas desentralisasi. Sedangkan daerah provinsi merupakan wakil pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan administratif yang mencakup lintas kabupaten dan kota. Desentralisasi pada dasarnya pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal.

Pola hubungan pemerintah antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengalami perubahan, yang sebelumnya era sentralistik yaitu memusatkan seluruh

wewenang kepada pusat berubah menjadi era desentralisasi yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari berlakunya desentralisasi di Indonesia. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki sebesar-besarnya dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Disisi lain pemerintah daerah harus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang optimal maka diberlakukan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004. Dengan Desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga Pemerintah Daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Kemandirian ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah seperti diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 6. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli daerah bersumber dari pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah.(Banu, 2023).

Faktor yang pertama yaitu PDRB, Dimana dengan peningkatan PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah melalui peningkatan nilai barang

dan jasa yang dihasilkan. Hal ini memiliki dampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah karena aktivitas ekonomi yang lebih tinggi biasanya meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang menjadi komponen Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, semakin besar Produk Domestik Regional Bruto, maka potensi penerimaan PAD juga meningkat, menciptakan hubungan positif antara keduanya.

Dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah atau pembangunan sarana dan prasarana, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah atau daerah (Sukmaraga, 2011).

Faktor yang kedua, Jumlah penduduk merupakan banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Menurut Sukirno dalam bukunya penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha membangun suatu perekonomian, karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pemimpin perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi. Jadi dengan bertambahnya penduduk maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menumbuhkan perekonomian akan mudah didapatkan, dan dengan bertambahnya penduduk maka akan memperluas pangsa pasar. Dikarenakan hal ini dapat meningkatkan permintaan terhadap produk serta akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian Patriansyah (2018), Menyatakan jumlah penduduk yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Dalam hal seperti ini, pendapatan pemerintah daerah dapat meningkat jika pertumbuhan penduduk diiringi oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Selain itu, hasil penelitian Susanto (2014) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, hasil penelitian Batik (2013) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah atau jumlah penduduk tidak memengaruhi tinggi atau rendahnya pendapatan asli daerah. Ini diduga disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar penduduk di daerah penelitian tidak produktif sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan daerahnya.

Faktor yang ketiga yaitu Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran Pemerintah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah sehingga akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Di samping itu dengan tersedianya sarana prasarana yang memadai dari pemerintah daerah maka masyarakat dapat melakukan aktivitas secara aman dan nyaman dimana akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat produktivitas. Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik para investor untuk membuka lapangan

usaha di segala sektor PDRB sehingga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Deliamov:2007).

Secara geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kepulauan yang dibagi menjadi 4 daratan yaitu : Daratan Flores, Daratan Timor, Daratan Sumba dan Daratan Alor. Jenis pemerintahanpun terdiri dari pemerintah Propinsi, Kabupaten, Kota dan Desa. Khusus untuk dua pemerintahan yang selevel yakni Kabupaten dan Kota terdapat perbedaan karakteristik yang dapat dibedakan dalam beberapa aspek yakni luas wilayah, kependudukan, mata pencarian penduduk, struktur pemerintahan, sosial budaya dan perekonomian. Berikut disajikan data variabel bebas dari 4 daratan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019-2023

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Se Daratan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019-2023 Menurut Jenis Penerimaan Dalam Satuan Rupiah dan Jiwa

Variabel Bebas	Tahun	Kabupaten/Kota Se Daratan Nusa Tenggara Timur			
		Daratan Timor	Daratan Flores	Daratan Sumba	Daratan Alor
Produk Domestik Bruto (Rp)	2019	33.974.430.000	21.928.880.000	8.497.770.000	2.007.180.000
	2020	33.603.410.000	22.867.490.000	8.467.390.000	1.996.040.000
	2021	34.406.110.000	22.250.420.000	8.586.550.000	2.045.990.000
	2022	35.328.660.000	22.929.670.000	8.484.670.000	2.106.890.000
	2023	36.624.470.000	23.778.190.000	9.128.570.000	2.193.100.000
Jumlah Penduduk (jiwa)	2019	1.972.632	1.913.146	805.716	205.599
	2020	2.011.735	1.932.644	817.846	206.806
	2021	2.157.368	1.897.248	788.189	213.994
	2022	1.981.190	1.919.002	799.771	216.629
	2023	2.011.349	1.964.452	820.506	221.536
Pengeluaran Pemerintah (Rp)	2019	6.954.920.000	7.858.660.000	3.661.190.000	1.126.030.000
	2020	6.618.210.000	7.517.300.000	3.421.030.000	1.071.440.000
	2021	6.324.660.000	6.623.120.000	3.373.410.000	1.065.590.000
	2022	6.421.720.000	7.886.500.000	3.478.580.000	1.013.790.000
	2023	6.553.590.000	7.263.260.000	3.741.190.000	1.002.130.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dan djpk.kemenkeu.go.id

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah. Keempat daratan di NTT, yaitu Timor, Flores, Sumba, dan Alor, memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal variabel-variabel ini, yang berkontribusi dalam peningkatan PAD.

Berdasarkan data yang disajikan di atas Angka PDRB tertinggi diperoleh dari Daratan Timor dengan angka Rp. 36.624.470.000 selama Tahun 2023 dan terendah diperoleh dari Daratan Alor dengan angka Rp. 1.996.040.000 pada Tahun 2020, sedangkan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Jiwa Tertinggi diperoleh dari Daratan Timor dengan Jumlah jiwa 2.157.368 selama Tahun 2021 dan terendah diperoleh dari Daratan Alor dengan Jumlah Jiwa 205.599 selama Tahun 2019 dan Angka Pengeluaran Pemerintah tertinggi diperoleh dari daratan Flores dengan angka Rp. 7.886.500.000 selama tahun 2022 dan terendah diperoleh dari Daratan Alor dengan angka Rp. 1.002.130.000 selama Tahun 2023.

Salah satu indikator utama yang menjelaskan mengapa daratan Timor memiliki potensi peningkatan PAD yang lebih besar dari daratan yang lain adalah nilai PDRB tertinggi. PDRB mencerminkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah, menunjukkan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis dan produktif. Semakin tinggi PDRB, semakin besar potensi basis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, baik dari sektor bisnis maupun individu, yang pada akhirnya berkontribusi pada PAD.

Aspek penting lainnya yang turut berkontribusi adalah jumlah penduduk Timor . populasi yang besar juga mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi, yang secara tidak langsung meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak transaksi lainnya yang sebagian dapat dialokasikan ke PAD.

Menariknya, data juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tertinggi diperoleh dari daratan Flores, bukan Timor, Meskipun demikian, pengeluaran pemerintah yang tinggi di Flores tidak secara otomatis berarti PAD-nya lebih tinggi dari Timor. Pengeluaran pemerintah lebih sering mencerminkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik, yang dapat bersumber dari transfer pusat maupun PAD sendiri. PDRB dan jumlah penduduk yang lebih unggul di Timor tetap menjadi faktor dominan dalam potensi peningkatan PAD-nya. Oleh sebab itu dapat dilihat bahwa Sedaratan Timor memiliki sektor-sektor ekonomi yang lebih produktif atau memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan wilayah sedaratan lainnya.

Dalam penelitian ini berkonsentrasi pada kondisi PAD Kabupaten/Kota Se Daratan Timor Tahun Anggaran 2019-2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Sedaratan Timor Tahun Anggaran 2019-2023 Dalam Satuan Rupiah

Tahun	Kota Kupang (Rp)	Kab. Kupang (Rp)	TTS (Rp)	TTU (Rp)	Kab. Belu (Rp)	Kab. Malaka (Rp)
2019	168.955.939.000	72.664.545.000	92.122.520.000	61.382.794.000	86.449.750.930,98	51.177.813.000
2020	167.530.108.000	70.027.756.000	64.192.990.000	55.742.221.000	85.079.640.923,64	54.531.471.000
2021	166.266.173.000	74.342.549.540	4.244.770.000	67.039.419.767	72.104.344.504,52	53.380.883.238,12
2022	186.122.187.000	52.409.861.380	165.387.000	39.930.896.000	70.137.377.000	37.295.002.576,54
2023	227.952.573.000	89.878.031.000	86.293.861.000	60.000.000.000	95.000.000.000	38.398.112.000

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur/BPS-Statistik.

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dari 6 Kabupaten/Kota Sedaratan Timor selama 5 tahun terakhir. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dari enam Kabupaten/Kota Sedaratan Timor selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi berarti mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun salah satu contoh yang jelas dari fluktuasi ini berdasarkan data yang disajikan yaitu pada Kabupaten Kupang dimana Pada tahun 2019, PAD Kabupaten Kupang tercatat sebesar Rp1.289.455.714.000 Ini merupakan nilai PAD tertinggi yang diperoleh Kabupaten Kupang selama periode pengambilan 5 tahun dalam penelitian. Kemudian, pada tahun 2020 PAD Kabupaten Kupang mengalami penurunan menjadi Rp1.175.919.370.000. Penurunan berlanjut pada tahun 2021, di mana PAD tercatat sebesar Rp74.342.550. Pada tahun 2022, PAD mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp52.409.861,38. Namun, pada tahun 2023, PAD Kabupaten Kupang kembali meningkat menjadi Rp89.878.031.000. kemudian PAD secara keseluruhan untuk Kabupaten/Kota Sedaratan Timor angka terendah selama periode 5 tahun berada di Kabupaten Kupang pada tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp. 52.409.861,38 sedangkan PAD peningkatan terbesar selama 5 tahun diperoleh pada Kabupaten Kupang juga tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp. 1.289.455.714.000. Terlihat juga bahwa setiap tahun pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Sedaratan Timor, NTT mengalami peningkatan namun tidak secara konsisten dari tahun ke tahun maka pemerintah daerah harus terus mengupayakan dan menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, PAD dipengaruhi oleh PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian Susanto (2014) juga menyatakan PDRB memiliki pengaruh positif terhadap PAD. PDRB digunakan sebagai indikator dari kondisi ekonomi suatu daerah. Membaiknya ekonomi suatu daerah akan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk membayar kewajiban, mengembangkan diri dan melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Akan tetapi dalam penelitian Eni Erviana (2018) diketahui juga bahwa PDRB bisa berpengaruh negatif terhadap PAD, diduga dikarenakan kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD yang menurun di daerah dengan nilai PDRB yang selalu meningkat tiap tahunnya. Lebih lanjut dalam penelitian Juwita (2022), menyatakan pendapatan asli daerah tidak dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto.

Lebih lanjut adalah jumlah penduduk. Penelitian yang dilakukan oleh Doni (2018) menemukan jumlah penduduk berpengaruh positif apabila terjadi peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) diikuti dengan peningkatan ide, peningkatan kualitas SDM yang mempunyai bakat dan kreativitas, dan peningkatan tenaga ahli, sehingga berdampak pada perkembangan teknologi, hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Gitaningtyas et al (2014); Henrikus (2016); Kumalawati (2016); Triani & Kuntari (2010). Hasil Penelitian yang berbeda ditemukan oleh Adriani & Handayani (2008), Jaya & Widanta (2014) jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap PAD. Hal tersebut terjadi ketika jumlah penduduk bertambah tidak diiringi dengan persebaran, struktur dan mutu SDM maka akan mengurangi PAD. Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Batik (2013) yang

menyatakan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Lombok Barat dan Juliansyah & Sulkadria (2018) menemukan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Simeulue.

Berikutnya adalah pengeluaran pemerintah. pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PAD karena pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk investasi atau pembelian aset dan pembangunan infrastruktur umum yang nantinya akan meningkatkan penerimaan PAD (Doni 2018; Mesra 2017). Berbeda dengan Kurniawan et al (2018), bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Kutai Barat, Prihartini (2017) menemukan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Mojokerto karena pengeluaran daerah tidak terkait dengan pelaksanaan program belanja pegawai dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Sedaratan Timor Tahun Anggaran 2019-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Sedaratan Timor ?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Sedaratan Timor ?
3. Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Sedaratan Timor ?
4. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Sedaratan Timor ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Sedaratan Timor
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Sedaratan Timor
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Sedaratan Timor

4. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Sedaratan Timor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memilih beberapa mamfaat yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademis:

Penelitian ini berfungsi sebagai bahan referensi untuk studi-studi di masa mendatang yang memiliki tema sejenis. Ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut tentang pengaruh yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

2. Bagi Pemerintah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Sedaratan Timor. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)